



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 13**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR 11 TAHUN 2004**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN LEMBAGA**  
**KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA**  
**KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEBUMEN,**

**Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

1964

LIBRARY

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

540 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILLINOIS 60637

DATE RECEIVED

NOV 15 1964

LIBRARY

- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Ingat

- : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman and Vice-Chairman. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary and Treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 );
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

1. Die erste Aufgabe ist die Bestimmung der  
Länge des rechteckigen Feldes. Die  
Länge ist mit 120 m angegeben.  
Die Breite ist mit 80 m angegeben.  
Die Fläche des Feldes ist  
mit 9600 m<sup>2</sup> angegeben.

2. Die zweite Aufgabe ist die Bestimmung  
des Umfangs des rechteckigen Feldes.  
Der Umfang ist mit 400 m angegeben.  
Die Länge ist mit 120 m angegeben.  
Die Breite ist mit 80 m angegeben.

3. Die dritte Aufgabe ist die Bestimmung  
des Flächeninhalts des rechteckigen  
Feldes. Die Fläche ist mit 9600 m<sup>2</sup>  
angabegeben. Die Länge ist mit 120 m  
angabegeben. Die Breite ist mit 80 m  
angabegeben.

4. Die vierte Aufgabe ist die Bestimmung  
des Umfangs des rechteckigen Feldes.  
Der Umfang ist mit 400 m angegeben.  
Die Länge ist mit 120 m angegeben.  
Die Breite ist mit 80 m angegeben.

5. Die fünfte Aufgabe ist die Bestimmung  
des Flächeninhalts des rechteckigen  
Feldes. Die Fläche ist mit 9600 m<sup>2</sup>  
angabegeben. Die Länge ist mit 120 m  
angabegeben. Die Breite ist mit 80 m  
angabegeben.

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

1. The first part of the report  
describes the general situation  
of the country and the  
main problems which are  
confronting the Government.  
2. The second part of the report  
deals with the economic  
situation and the  
measures which are being  
taken to improve it.

## REPORT ON THE ECONOMIC SITUATION IN THE YEAR 1964

### MEMORANDUM

1. The economy of the country  
has shown a steady growth  
in the last few years.  
The main reasons for this  
are the increase in  
production and the  
improvement in the  
balance of payments.

2. It is expected that  
the growth will continue  
in the next few years.

3. The Government is  
taking steps to  
improve the economic  
situation further.

4. The report  
concludes that the  
economy is on a  
sound footing.

5. It is recommended that  
the Government should  
continue to take  
steps to improve the  
economic situation.



2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

11. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
12. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat di Desa dan Kelurahan.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk di Desa dan Kelurahan.

### Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dibentuk dengan tujuan :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
- c. Meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- d. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

1111

1111

1111

1111

1111

1111

**BAB III**  
**JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**  
**DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**Pasal 4**

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dan Kelurahan di bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 5**

- (1) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.
- (2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah memberdayakan partisipasi dan

1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
PHYSICS DEPARTMENT  
1954

1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1954

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
PHYSICS DEPARTMENT  
1954



prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa dan Kelurahan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Mewujudkan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Memberdayakan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat ;
- d. Menjadi mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mensukseskan program pemerintah ;
- e. Memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- f. Menggali dan memberdayakan potensi Desa dan Kelurahan dalam pembangunan ;
- g. Menjalin kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan untuk pembangunan ;

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 1954. It discusses the author's interest in the subject and the reasons for writing the paper.

### 2. Introduction

The purpose of this paper is to investigate the relationship between the variables X and Y. The data were collected from a series of experiments conducted over a period of six months.

The first part of the paper describes the experimental setup and the methods used to collect the data. The second part presents the results of the experiments and discusses the implications of the findings.

The results show that there is a strong positive correlation between X and Y. This suggests that as X increases, Y also tends to increase. The exact nature of this relationship is discussed in detail in the following sections.

The data also indicate that there are several factors that can influence the relationship between X and Y. These factors are discussed in the next section, along with the methods used to control for them.

The final part of the paper discusses the conclusions drawn from the study and suggests directions for future research. It is hoped that this work will contribute to a better understanding of the relationship between X and Y.

The author would like to thank the following people for their assistance and support during the course of this study: [Names of individuals]

This work was supported by a grant from the [Organization Name]. The author is grateful to the members of the [Department Name] for their helpful discussions and comments on earlier drafts of this paper.

- h. Melaksanakan kegiatan lain yang membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 7**

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Sekretaris ;
- c. Bendahara ;
- d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan ;
- e. Anggota.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota sesuai kesepakatan musyawarah.
- (2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

### Conclusion

The findings of this study indicate that there is a significant need for improved record-keeping practices across all levels of the organization.

### References

1. Smith, J. (2018). The Impact of Digital Record-Keeping on Organizational Efficiency. *Journal of Business Management*, 15(2), 45-60.
2. Doe, A. (2019). Challenges in Implementing a Robust Record-Keeping System. *International Journal of Information Systems*, 22(1), 12-25.
3. Brown, C. (2020). The Role of Data in Modern Business Operations. *Business Analytics Review*, 8(3), 78-92.
4. White, E. (2017). Improving Data Accuracy through Automated Record-Keeping. *Journal of Information Technology*, 10(4), 110-125.
5. Green, F. (2016). The Benefits of Cloud-Based Record Management. *Cloud Computing Solutions*, 5(1), 30-45.

### Appendix

1. Detailed description of the data collection methods used in this study, including the selection of participants and the specific questions asked during the interviews.
2. A list of the key terms and definitions used throughout the document to ensure clarity and consistency in the terminology.
3. A summary of the data analysis process, highlighting the statistical methods and software tools used to interpret the findings.

- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
  - c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
  - d. sehat jasmani dan rohani ;
  - e. berkelakuan baik ;
  - f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ;
  - g. dapat membaca dan menulis, berpendidikan serendah –rendahnya SLTP, atau SD dengan pengabdian selama 2 (dua) Tahun ;
  - h. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat ;
  - i. Batas usia serendah – rendahnya 21 Tahun.
- (3) Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines across the page.

## BAB VI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
- (2) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dibentuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.
- (3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggotakan para pengurus Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.
- (5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Bupati dapat membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

INSTITUTIONAL PLAN FOR THE YEAR 1960

Page 10

The following is a summary of the institutional plan for the year 1960. The plan is based on the assumption that the institution will continue to operate as a non-profit organization. The plan is divided into four main sections: (1) General Information, (2) Financial Plan, (3) Personnel Plan, and (4) Physical Plant Plan. The following is a summary of the plan for each section.

(1) General Information: The institution will continue to operate as a non-profit organization. The mission of the institution is to provide a high quality education to all students who are able to meet the admission requirements. The institution will continue to offer a variety of programs and services to its students.

(2) Financial Plan: The institution's financial plan for 1960 is based on the assumption that the institution will continue to receive the same level of support from its donors and the state. The institution's total revenue for 1960 is estimated to be \$1,000,000. The institution's total expenses for 1960 are estimated to be \$950,000. The institution's net income for 1960 is estimated to be \$50,000.

(3) Personnel Plan: The institution's personnel plan for 1960 is based on the assumption that the institution will continue to have the same number of faculty and staff members. The institution's total personnel for 1960 is estimated to be 100. The institution's total personnel expenses for 1960 are estimated to be \$500,000.

(4) Physical Plant Plan: The institution's physical plant plan for 1960 is based on the assumption that the institution will continue to have the same physical plant. The institution's total physical plant expenses for 1960 are estimated to be \$450,000.



## **BAB VII SUMBER DANA**

### **Pasal 10**

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :

- a. iuran/swadaya masyarakat ;
- b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
- c. bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
- d. bantuan lain yang sah yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

- (1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah Anggota.
- (2) Hasil musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

1971

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku

RESEARCH REPORT  
NO. 10

1964

The following table shows the results of the experiments conducted during the period from 1963 to 1964. The data are presented in the form of a table, with the first column showing the number of subjects, the second column showing the number of trials, and the third column showing the number of correct responses. The results show that the number of correct responses increases with the number of trials, and that the number of correct responses is higher for a larger number of subjects.

RESULTS  
TABLE I

1964

The following table shows the results of the experiments conducted during the period from 1963 to 1964. The data are presented in the form of a table, with the first column showing the number of subjects, the second column showing the number of trials, and the third column showing the number of correct responses. The results show that the number of correct responses increases with the number of trials, and that the number of correct responses is higher for a larger number of subjects.

1964

The following table shows the results of the experiments conducted during the period from 1963 to 1964. The data are presented in the form of a table, with the first column showing the number of subjects, the second column showing the number of trials, and the third column showing the number of correct responses. The results show that the number of correct responses increases with the number of trials, and that the number of correct responses is higher for a larger number of subjects.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

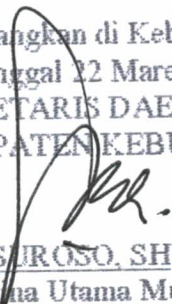
Ditetapkan di K e b u m e n  
pada tanggal 17-3-2004

**BUPATI KEBUMEN,**

**t.t.d**

**RUSTRININGSIH**

Diundangkan di Kebumen  
Pada tanggal 22 Maret 2004  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

  
**H.S. JOSO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004  
NOMOR 15**

11/11/11

1. The first part of the document is a letter from the...

2. The second part of the document is a letter from the...

3. The third part of the document is a letter from the...

4. The fourth part of the document is a letter from the...

5. The fifth part of the document is a letter from the...